

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Desember 2018/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SUB UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YESI MAYASANTI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 618934

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 332.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m<sup>2</sup>/23 m<sup>2</sup> di SAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 332.800.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 55.150.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.350.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 22.800.000
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 7.400.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.800.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 403.150.000**III. HUTANG** Rp. 25.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 378.150.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.